

Pembicara/Pemakalah Undangan Khusus

PENGELOLAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

: Saut Poltak Tambunan, Sastrawan

Pengantar

TAK BANYAK yang risau ketika tahun 2011 lalu seorang pejabat Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan bahwa dari 746 bahasa daerah yang masih ada di Indonesia, diperkirakan pada akhir abad ke-21 ini akan bersisa 10%. Itu berarti hanya bersisa 75 bahasa daerah. VOA Indonesia memberitakan ini pada 23 September 2011. Pertanyaan pertama yang segera muncul adalah, seperti apakah keberagaman budaya kita nanti?

Juga tak banyak yang peduli bahwa tanggal 21 Februari telah ditetapkan oleh Unesco – PBB sebagai Hari Internasional Bahasa Ibu sejak 17 November 1999 lalu. Di Indonesia Hari Bahasa Ibu nyaris tak terdengar gaungnya. Padahal sebagian besar anak bangsa ini belajar bicara dari bahasa daerah yang dalam artian sastra adalah Bahasa Ibu (*mother tongue*).

Terkait dengan pengelolaan bahasa dan sastra daerah, konservasi dan revitalisasi menjadi keniscayaan. Sastra modern berbahasa daerah harus digiatkan, karena sangat potensial untuk pelestarian bahasa. Terbukti di antaranya, sastra modern berbahasa Batak telah membangkitkan kembali gairah berbahasa Batak.

1. Bahasa Daerah Di Tengah Modernisasi

Perihal bahasa daerah di tengah modernisasi, tak bisa lepas dari kekhawatiran terhadap mengenai ancaman kepunahan. Pada era global ini tak ada bahasa daerah yang luput dari ancaman, termasuk bahasa Jawa dan Sunda yang jumlah penuturnya masih mencapai 68.044.660 orang dan 32.412.752 orang. (*Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia, Pusbanglin – Badan bahasa, 2017*).

Di banyak pelosok, bahasa daerah sebagai bahasa ibu digantikan oleh bahasa Indonesia dengan aksentuasi kedaerahan. Sebagian besar bahasa daerah sebagai bahasa ibu maupun sebagai bahasa percakapan sehari-hari, semakin ditinggalkan oleh penuturnya. Anak-anak sejak dini dibiasakan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa asing dianggap lebih perlu, bukan bahasa daerah.

Bahasa Indonesia yang kita sepakati menjadi bahasa persatuan, menjadi pemangsa bagi kosakata asli bahasa daerah. Semua bahasa daerah mengalami tekanan yang sama. Di daerah Batak, misalnya, bukan karena ‘*onan*’ (pasar tradisional) telah ditutup sehingga tak ada lagi

penjual *lasiak* atau *lasinga*, *alia*, *halas*, *parmasak*, *palia* atau *parira*, *joring* dan lain seperti itu. Tetapi karena sudah berganti nama menjadi *cabe*, *jahe*, *lengkuas*, *lada*, *pete* atau *pote* dan *jengkol*. Bukan pula sukses program Indonesia Sehat yang membuat banyak penyakit lenyap dari tanah Batak. *Ngege* misalnya, *darang*, *labi-labi*, *arunon*, *sanggulan*, *mongkol* dan penyakit lainnya. Tetapi karena orang menyebutnya sebagai *cacar*, *eksim*, *cacingan*, *demam*, *campak*, *batuk* dan selain semacam itu.

Perubahan gaya hidup dalam modernisasi turut mempercepat hilangnya banyak kosakata asli daerah dalam percakapan. Generasi Batak '*milenia - zaman now*' tidak tahu lagi apa yang disebut *mamiari* (menampi beras), *sobuon* (ujung tajam kulit padi), *monis* (serpihan kecil beras). Tak tahu *soban* (kayu bakar), *para-para* (tempat kayu bakar di atas *tataring* atau tungku), *siudut hosa* (tabung bambu kecil alat untuk meniup bara jika api padam) *hudon*, (periuk), *purik* (tajin), *mangariri* (mengurangi air tajin dari adonan nasi), *manghariar* (mengaduk adonan nasi dengan tangkai *sonduk dasar* atau tangkai centong tempurung), *hurhur* (kerak nasi), dan lain seterusnya. Kurang lebih 20 kata dalam bahasa Batak hilang ditelan teknologi baru menanak nasi, bernama *rice cooker*.

Dahulu *Marsoban* (mencari kayu bakar ke hutan) adalah sarana untuk merapatkan pertemanan bagi remaja. Sedangkan *Manulu api* atau menyulut (meminta) api dari tungku tetangga adalah tradisi yang indah, ekspresi kerukunan dengan tetangga. Sekarang hilang. Tak banyak lagi orang menggunakan kayu bakar untuk memasak, diganti dengan kompor gas elpiji. Maka hilanglah pula kata *marsoban* dan *manulu api* berikut sekian banyak kata ikutannya.

Bahasa dan sastra daerah muncul juga dalam nama-nama khas suku penuturnya. Pada orang Batak nama adalah semacam doa, impian dan harapan. *Saut Poltak*, misalnya, berarti jadilah terbit/purnama, atau *sido muncul* dalam bahasa Jawa. *Sabam Maruli Asi* (kesabaran yang mendatangkan sukacita dalam kasih), *Jojo Marito* (semoga punya adik berturut-turut perempuan atau laki-laki), *Luhut Binsar* (terbit seluruh), *Tahi Bonar* (rancangan kebenaran), *Partogi* (pemimpin), *Haposan* (orang kepercayaan), *Marisi Dame* (penuh kedamaian).

Sekarang berubah. Orang-orang tua memberi nama anaknya seperti bukan orang Batak. Bisa menjadi *Beckham*, *Ronaldo*, *Sharapova*, *Whitney Houston*, *Celine Dion*, *Leonardo Caprio*, *Justin Biebr*, *Richard Max*, mengambil nama dari film, sinetron, olah raga dan celebrities lainnya. Atau *Djoko*, *Rahayu*, *Bambang* dan *Sri Sulastri*, nama dari suku lain.

Semakin banyak orang enggan atau malu menunjukkan identitas primordialnya. Seseorang malah sering dianggap hebat jika sudah tak tampak lagi ciri dan karakter keaslian sukunya. Kondisi ini mendorong banyak orang untuk berusaha menyembunyikan ciri-ciri etnisnya. Sering berlagak tak tahu bahasa dan tradisi daerah asalnya.

Di kampung-kampung, berbahasa Indonesia menjadi bagian dari gaya hidup. Berbahasa daerah sering dianggap sebagai penghambat proses asosiatif bagi interaksi sosial yang harus dihadapinya di negeri orang, jika nanti harus merantau ke luar daerah. Berbahasa daerah dianggap sudah anakronis, ketinggalan zaman, bahkan keliru zaman.

Telunjuk kita menuding lurus ke arah modernisasi sebagai biang keladinya. Di dalamnya ada urbanisasi, ada pernikahan antaretnis (*amalgamation*) dan akulturasi terhadap lingkungan sosial heterogen dan multietnis. Termasuk teknologi informasi yang umumnya '*serba English*', pendidikan serta pengetahuan diantarkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Kondisi ini diperburuk dengan marginalisasi pendidikan bahasa daerah di sekolah. Pendidikan bahasa lokal, jikalau masih ada, dipandang hanya pelengkap kurikulum dan tidak begitu menentukan dalam mengindikasikan keberhasilan pendidikan. Buku-buku baru atau media cetak berbahasa daerah pun semakin langka. Bahkan ada sekolah yang melarang muridnya berbahasa daerah di sekolah.

Di banyak daerah nyaris tak ada institusi resmi yang merasa wajib dan konsisten mengawal bahasa daerah. Bahasa Batak misalnya, selama ini dikawal oleh lembaga adat dan agama. Begitu pun, belakangan gereja di kota besar mulai menjaga jarak dengan bahasa daerah.

Modernisasi memang melukai tradisi. Kita tidak perlu menuding siapa-siapa, hanya kita penganut tradisi itu yang harus melestarikannya. Akankah kita biarkan bahasa daerah punah karena ditinggalkan oleh penuturnya? Haruskah bahasa daerah punah demi bahasa persatuan Bahasa Indonesia yang kita banggakan itu?

2. Momentum Kebangkitan Bahasa dan Sastra Daerah

Sesungguhnya sinyalemen Kemendiknas tahun 2011 ini adalah peringatan atau 'woro-woro' bagi setiap pemangku kepentingan budaya. Sebab jika kebudayaan adalah tentang akal dan budi, tentang karsa, rasa, dan cipta, maka bahasa adalah 'darah'-nya. Bahasa dan sastra adalah tentang pola pikir, pola hidup dan tata nilai. Bahasa daerah adalah sejarah dan identitas etnis yang menunjukkan keberagaman kita, serta menjadi 'ruh' dari kearifan lokal yang mewarnai kebudayaan daerah, yang adalah kekayaan negeri ini. Apa jadinya kebudayaan daerah tanpa bahasa daerah?

UUD 1945 pasal 32 menyatakan bahwa Negara harus menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini berarti Undang-undang Dasar sudah mengamanatkan tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. Regulasi ditetapkan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Lihat misalnya Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 *Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta*

Lagu Kebangsaan dan Permendagri Nomor 40 tahun 2007 *Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah*, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 *Tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia*.

Setelah ‘woro-woro’ tahun 2011, terdapat 8 Peraturan Gubernur yang diterbitkan antara tahun 2013 sampai 2015, termasuk Pergub No 20/2013 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Terdapat 14 provinsi yang sudah menerbitkan Perda, 7 di antaranya diterbitkan sebelum tahun 2011. Bali mendahului dengan Perda No 3/1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Perda terbaru dari Sumatra Utara dengan Perda No 17/2017. Di tingkat Bupati/Walikota ada 6 peraturan, di antaranya 5 peraturan terbit antara 2011 – 2017.

Sebenarnya regulasi ini relatif sedikit dibanding dengan 746 bahasa daerah pada 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Namun catatan di atas setidaknya menunjukkan bahwa setelah tahun 2011 beberapa pemerintah daerah menaruh perhatian untuk melestarikan bahasa daerah. Tentu bisa diteliti apakah ada kaitannya dengan ‘woro-woro’ Kemendiknas 2011. Tentang efektifitas pelaksanaannya juga masih tanda tanya, sebab kondisinya tidak sama bagi masing-masing daerah.

Pernah berharap agar ‘woro-woro’ Kemendiknas 2011 dimaksud akan berkembang menjadi *momentum Nasional kebangkitan bahasa dan sastra daerah*. Sebab momentum ini yang saya rasakan sehingga memutuskan untuk sementara meninggalkan sastra nasional (bahasa Indonesia) yang saya tekuni sejak 1973. Akhir tahun 2011 saya beralih merintis penulisan sastra modern pertama dalam bahasa Batak Toba, setidaknya dalam 60 tahun terakhir. Buku yang pertama kumpulan cerita pendek *Mangongkal Holi* terbit Maret 2012.

Penggerusan terhadap bahasa daerah diharapkan akan terbendung, sekiranya momentum kebangkitan ini dapat menjangkau para sastrawan nasional. Mereka perlu didorong agar juga berkarya dalam sastra daerah.

3. Selamatkan Bahasa Daerah!

Seorang sastrawan senior *Ajip Rosidi* merintis pemberian penghargaan dan Hadiah Sastra RANCAGE yang berlangsung setiap tahun sejak 1989. Berarti sudah hampir 30 tahun. Ajip Rosidi mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk sastra daerah. Bukan saja bahasa Sunda, tetapi juga bahasa daerah seluruh Nusantara.

Saya meraih Hadiah Rancage 2015, kali pertama untuk sastra daerah Batak. Penyerahan hadiah dilakukan seminggu sesudah peresmian gedung megah Perpustakaan AJIP ROSIDI di jalan Garut Bandung. Saya beruntung mendapat kesempatan memberi sambutan mewakili para

penerima penghargaan. Saya sampaikan, bahwa di negeri yang ‘sakit minat baca’ ini, kita butuh lebih banyak ‘Ajip Rosidi’.

Tempo lain tahun 2016, ada tiga serangkai himbauan yang saya temukan pertama pada spanduk di seberang halaman SMA Negeri 1 Siborong-borong Sumatra Utara. Ketika itu saya mengantarkan sumbangan buku-buku berbahasa Batak. “*Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing*”.

Indah, optimis dan menggembirakan. Tentang bahasa Indonesia, tentu sudah kita utamakan bahkan merasuk jauh ke benak anak-anak usia dini. Bahasa asing pun sudah mengiring langkah kegiatan kita di segala tempat dan waktu. Bahkan sejak TK pun anak-anak sudah diajarkan bahasa asing. Ada banyak kawasan dan ruang publik di negara ini yang justru mengutamakan bahasa asing dan menganak-tirikan bahasa Indonesia, terutama di kota besar. Di daerah Serpong Tangerang, misalnya, ada kawasan hunian termasuk *mal* besar yang sangat pelit berbahasa Indonesia dalam menuliskan nama jalan, papan iklan, nama toko, restoran dan lain-lain. Serasa bukan di NKRI.

Lalu melestarikan bahasa daerah itu bagaimana, cukupkah himbauan? Seorang tokoh budiman mendirikan sekolah di Sumatra Utara. Ia memberitahu kepada saya bahwa di sekolahnya dilarang berbahasa daerah. Artinya, tentu murid akan dihukum jika ketahuan. Ini memprihatinkan.

Bahasa daerah memang tidak diutamakan dalam mencari pekerjaan, tetapi bahasa daerah akan mengantarkan anak didik ke pintu utama ruang-ruang budaya etnik. Banyak kearifan lokal dan nilai luhur tradisional yang hanya tepat ditransformasikan lewat bahasa daerah dan itu akan membentuknya menjadi seseorang dengan pribadi yang teguh dan tangguh. Itulah karakter yang diperlukan kelak saat mencari pekerjaan. Pudarnya minat bertutur dalam bahasa daerah, menyebabkan hilangnya banyak kearifan lokal.

Ada 7000 bahasa di dunia, 50% di antaranya terancam punah. Pada 21 Februari 2009, UNESCO merilis bahwa 2500 bahasa di dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. 200 bahasa telah punah dalam 30 tahun terakhir dan 607 tidak aman (*materi diskusi Kepala Bidang Pelindungan, Dr. Ganjar Harimansyah, peluncuran buku cerpen bahasa Batak Toektak Mandoeda Eme, Juni 2018*).

Beruntunglah bahasa daerah di pulau Jawa dan Bali, karena semua provinsi di pulau ini sudah menerbitkan Pergub untuk pengembangan dan pembinaan bahasa daerah. Bahasa Jawa dan Sunda memiliki jumlah penutur terbesar, juga memiliki majalah berbahasa daerah. Pada bahasa Jawa antara lain terdapat *Jayabaya, Panyebar Semangat, Djaka Lodang, Sempulur*, dan *Jagad Jawa*, meski penyetianya semakin menyusut. Beberapa lainnya sudah tak terbit.

Bahasa Sunda lebih beruntung lagi. Tercetak dalam ingatan sekian banyak nama majalah, Koran atau tabloit berbahasa Sunda, seperti *Mangle*, *Cupumanik*, *Sunda Midang*, *Galura*, *Cakakak* dan lain-lain. Belum lagi majalah majalah ‘Persib’ seperti *Persib Euy!*, *Nu Aing*, *Persib Magz*, *Bobotoh* dan *Make Manah*.

Melestarikan bahasa daerah tidak cukup dengan himbauan. Tidak cukup dengan membubuhkan tanda ‘like’ di media sosial. Tidak bisa seperti lagu *Anak Medan* yang membiarkan ‘*pohon pinang tumbuh sendiri*’, karena sebaliknya bisa layu lalu mati sendiri. Sastra daerah pada umumnya didominasi oleh sastra lisan, yang isinya adalah dongeng hikayat, pantun dan nyanyian. Buku berbahasa daerah mutlak diperlukan, sementara penulis berbahasa daerah sangat kurang dan penurunan minat baca semakin pesat.

Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dengan masyarakat sastra untuk melakukan *konservasi* dan *revitalisasi* terhadap bahasa daerah. Dukungan dan bantuan untuk penulisan buku sastra modern berbahasa daerah adalah keniscayaan, termasuk penyebarannya ke perpustakaan sekolah, rumah/taman bacaan masyarakat. Bahasa daerah harus dimasukkan sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Kepala daerah serta anggota dewan perwakilan seharusnya aktif berbahasa daerah, terutama di kabupaten. Jangan lagi ada Bupati yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh rakyatnya, karena tidak faham bahasa daerah.

4. Tanggung Jawab Pewarisan Bahasa Daerah

Tarombo atau silsilah orang Batak, mungkin bisa masuk rekor dunia sebagai *famili tree* terbesar di dunia. Tak ada orang Batak yang tak bisa dicari dalam silsilah. *Tarombo* terjaga karena dirawat dengan disiplin dalam mencatat setiap kelahiran anak laki-laki (*patrilinear*). Pewarisan silsilah bagi seorang lelaki Batak akan terputus jika tidak menurunkan anak laki-laki.

Pewarisan bahasa daerah juga bisa dianalogikan seperti itu. Bahasa daerah yang diwarisi turun temurun akan terputus dalam sebuah keluarga apabila tidak diturunkan kepada keturunannya.

Jargon baru ‘*kawe-kawean*’ sering saya pinjam untuk menjelaskan vitalitas dan tanggung jawab pewarisan bahasa daerah. Sebutlah kategori ‘*ori*’ (orisinal) bagi mereka yang fasih berbahasa daerah. Modernisasi yang merasuk dalam keluarga akan melahirkan calon-calon orang tua ‘*Kw 1*’, yaitu mereka yang lidahnya sudah kaku berbahasa daerah. *Kw 1* akan melahirkan *Kw 2* yang pasif, faham bahasa daerah serba terbatas dan tak mampu mengucapkannya, Seterusnya akan melahirkan *Kw 3* yang sama sekali tak mengerti apa-apa.

Berarti hanya dalam tiga generasi setelah 'ori'. Jika 25 tahun/generasi, dalam 75 tahun bisa punahlah bahasa daerah itu. Dengan begitu, ada benarnya perkiraan Kemendiknas, bahwa pada akhir abad ini bahasa daerah akan bersisa hanya 10% atau 75 bahasa saja.

5. *Bahasa Batak, Sekarang dan Esok*

Sensus 2010, jumlah suku Batak adalah 8.466.969 jiwa atau 3,58 persen dari penduduk nasional. Di atas Batak, ada suku Jawa (40 persen) dan Sunda (15,5 persen) yang menduduki urutan pertama dan kedua.

Pada Profil Bahasa Daerah di Indonesia (*Pusbanglin, Badan Bahasa, 2017*), dicatat bahwa dari 71 bahasa daerah yang sudah dipetakan vitalitasnya. Terdapat 5 bahasa daerah di Sumatra Utara yang masuk dalam kriteria stabil, tetapi terancam punah.

Dicantumkan pula bahwa jumlah penutur bahasa Batak adalah 3.318.360 orang. Tidak dirinci apakah ini gabungan dari 5 bahasa puak, (Toba, Karo, Simalungun, Mandailing-Angkola dan Pakpak-Dairi), atau hanya dari Toba. Sebab menurut Wikipedia '*saat ini diperkirakan terdapat kurang-lebih 2.000.000 orang penutur Bahasa Batak Toba, yang tinggal di bagian barat dan selatan Danau Toba*'. Terutama meliputi 4 kabupaten pemekaran ex Tapanuli Utara di Sumatera Utara, yaitu *Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba Samosir*.

Batak adalah satu dari sedikit suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan aksara sendiri. Ironis, karena tidak memiliki tradisi tulis untuk sastra. Tradisi tulis hanya ditemukan pada kulit kayu (laklak) yang disebut *pustaka*. Bentuknya tersusun berlipat-lipat, berisi Aksara Batak dan gambar yang mistis. Lainnya terukir pada bambu atau tulang. Tradisi ini pun sudah punah.

Ms Roberta, kandidat doktor dari Jerman dalam diskusi *Pustaka Batak* (literasi Batak) bulan Agustus 2018 lalu di Perpustakaan Nasional Jakarta, juga mengaku tidak menemukan dongeng (sastra lama) dalam aksara Batak. Hanya dituliskan untuk keperluan pengobatan, perdukunan dan ramalan. Mungkin itu juga sebabnya aksara ini semakin ditinggalkan. Saat ini para penuturnya menggunakan aksara Latin untuk menuliskan bahasa Batak.

Dahulu sastra Batak berkembang secara lisan, tentu saja sastra lama. Tidak tertulis. Aksara Batak pun tidak digunakan untuk berkomunikasi atau sastra. Karena itu mudah tergilas budaya pop. Banyak sastra lama yang hilang, seperti *turi-turian, oing-oing, joting, andung-andung*, nyanyian anak-anak kala bermain (dolan), lagu pengantar tidur, repertoar gondang Batak. Karena tidak tertulis, sebagian sastra lama dalam bentuk *umpama* (peribahasa) dan *umpasa* (pantun) menjadi tak jelas atau bergeser maknanya.

Sayang sekali pengajaran di bidang bahasa dan aksara Batak ini sudah terpinggirkan di sekolah-sekolah. Dr.Uli Kozok, seorang ahli bahasa kuno (filolog) berkebangsaan Jerman, telah membuat *aplikasi font* aksara Batak sehingga sekarang orang boleh melakukan pengetikan aksara Batak dengan komputer. Meski begitu, minat untuk beraksara Batak tetap semakin rendah.

6. Bahasa Batak vs Bahasa Indonesia

Bangsa ini sudah sepakat untuk menerima bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional, bahasa pemersatu. Tetapi sesungguhnya tidak harus melemahkan atau mematikan bahasa daerah. *National Geographic Indonesia* pada 15 Juni 2015 merilis hasil penelitian tim Komisi III DPD RI tentang 14 bahasa daerah yang telah punah. Selanjutnya hanya 13 bahasa daerah yang penuturnya lebih dari satu juta orang, yaitu *Aceh, Batak, Minangkabau, Rejang, Lampung, Sunda, Melayu, Jawa, Madura, Bali, Sasak, Makassar, dan Bugis*.

Dalam kunjungan literasi 2 minggu pada April 2016 saya berkeliling di 4 Kabupaten ex Tapanuli Utara (Tapanuli Utara, Toba samosir, Humbang Hasundutan dan Samosi) yang berbasis bahasa Batak Toba, sambil membagikan sumbangan buku-buku berbahasa daerah kepada 50 entitas pendidikan. Saya berkesimpulan bahwa Bahasa Batak pada umumnya sudah bukan bahasa ibu di tempat asalnya. Sudah berganti dengan bahasa Indonesia yang dituturkan dengan aksentuasi setempat.

Anak-anak di bawah 10 tahun yang fasih dan santun berbahasa Batak, saya temukan hanya di *Huta Balian Sianjur Mula-mula* – desa terpencil di balik Gunung Pusuk Puhit. Begitu pun, karena mereka dibina dan diasuh dengan tekun oleh seorang aktifis muda pelestarian budaya Batak, *Nagoes Puratus (Richard) Sinaga*, di bawah atap *Rumah Belajar Sianjur Mula-mula*.

Pembiaran adalah salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya budaya. Pembiaran dalam kesalahan berbahasa Batak pun berlangsung *massive*. Kata dan ungkapan dilafalkan dengan bunyi sekenanya. Ini terjadi karena penuturnya jarang atau tidak pernah menemukan kata atau ungkapan itu secara tertulis. '*Jadi*' dilafalkan '*jai*' atau '*jei*'. '*Dibahen na*' dilafalkan dan dituliskan sebagai '*benna, banna, ibenna dan ibanna*'. '*Mansai*' menjadi '*saik*' atau '*sek*'. '*Gadong hau*' pun menjadi '*garingkau*'.

Tak bisa disalahkan bila mereka bersikeras bahwa merekalah yang benar, sebab itu yang didengar sejak masa kecil dan mungkin tak menemukan kata-kata itu secara tertulis untuk menjadi acuan. Kekeliruan serupa terjadi saat menuliskannya, ditulis seperti bunyinya. Misalnya '*akka, muppat, hokkop, hakkam*' yang seharusnya ditulis '*angka, mumpat, hophop,*

hamham'. Sekali lagi, pembiaran demi pembiaran terus berlangsung. Tak ada pihak yang merasa perlu dan berkepentingan atau berkewajiban untuk membetulkannya.

Sastra dalam lagu Batak semakin dangkal bahkan sarat dengan penggerusan bahasa. Sementara dalam *umpama* (peribahasa) dan *umpasa* (pantun doa dan petuah) banyak menggunakan kata yang sudah arkais terutama pada sampiran. Penutur seringkali sudah tak faham apa yang dilontarkannya.

Sama seperti bahasa daerah lain, Bahasa Batak semakin termarginalkan. Ditambah lagi hidup sehari-hari yang serba '*English*'. Tak ada pelajaran yang diantarkan dengan bahasa daerah. Pun kemampuan berbahasa daerah tidak ikut menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan.

7. Kebangkitan Sastra Modern Bahasa Daerah Batak

Saya menjadi pembicara di Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) tahun 2011, lalu menjadi kurator UWRF tahun 2012. Ketika itu UWRF disebut-sebut sebagai festival sastra internasional yang terbaik ke-enam. Tentu bangga menjadi bagian dari perhelatan besar ini. Tetapi sebaliknya, justru dalam festival inilah saya merasa *terpanggil dan tertantang* untuk menjawab 'woro-woro' Kemendiknas itu: *Selamatkan bahasa daerah!*

Saya lalu meninggalkan sastra Nasional, merintis *jalan sunyi* untuk *pulang kampung* melalui sastra modern berbahasa Batak. Saya menulis novel, cerita pendek dan puisi berbahasa Batak, sesuatu yang baru untuk bahasa Batak (Toba) dan belum tentu ada yang mau baca.

Pada akhir Agustus 2012 kami mendirikan *Komunitas Sastra Batak TORTOR SANGOMBAS* di Media Sosial. Disingkat dari *Torsa-torsa Sijahaon Sangombas* yang berarti cerita pendek bacaan selintas, semacam *flash fiction*. Melalui komunitas ini saya berhasil mendapuk para penulis baru dan menerbitkan buku sastra modern berbahasa Batak. Hingga Agustus 2018 Tortor Sangombas sudah berusia 6 tahun. Sejak tahun 2015 sudah meraih 7 penghargaan Rancage. Termasuk penghargaan khusus untuk *Soekirman, Bupati Serdang Bedagai*, sebagai seorang Jawa yang menulis cerpen bahasa Batak - yang bukan bahasa ibunya (*Kumpulan cerpen Serser Sauduran*). Tahun 2017 *Komunitas Sastra Batak* ini berubah menjadi *Komunitas Sastra Etnik TORTOR SANGOMBAS*, dengan tujuan untuk menjangkau pegiat sastra daerah lain. Bukan hanya bahasa Batak.

Sastra daerah Batak sudah bangkit? Setidaknya begitulah menurut pandangan komunitas Tortor Sangombas. Penulis-penulis baru muncul, juga dari luar komunitas Tortor Sangombas. Di media sosial semakin banyak orang tak ragu menulis dalam bahasa Batak. Komunitas

berbahasa Batak di media sosial semakin ramai. Kami juga selenggarakan lomba menulis cerpen dalam bahasa Batak.

Sejak buku pertama tahun 2012 hingga 2018 sedikitnya 20 buku baru berbahasa Batak (Toba) terbit dalam bentuk novel, kumpulan cerpen, puisi dan esai. 15 buku di antaranya dari komunitas *Tortor Sangombas*. Undangan untuk berdiskusi, bedah buku serta baca puisi bahasa Batak diterima dari berbagai komunitas, kampus, sekolah, perpustakaan dan gereja.

Memang ini belum seberapa dibanding dengan 3.318.360 penutur bahasa Batak atau 2.000.000 lebih penutur khusus bahasa Batak Toba. Tetapi setidaknya upaya ini sudah berada di garis awal dan jalur yang tepat. Harus ditingkatkan, agar momentum ini tak sampai lewat.

Dengan dukungan dan bantuan anggota komunitas, sebagian buku kami sisihkan dan sumbangkan ke sekolah, perpustakaan dan rumah baca di daerah asal. Sebagian kami jadikan hadiah Natal kepada para penambal ban seputar Jakarta.

Setiap tahun Tortor Sangombas merayakan Hari Internasional Bahasa Ibu 21 Februari dengan diskusi dan peluncuran buku baru berbahasa Batak. Termasuk buku puisi *Bangso na Jugul (Panusunan Simanjuntak)* yang tahun 2018 ini menerima Hadiah Rancage. Saat ini pun kami sedang merancang satu buku kumpulan cerita pendek dari 5 bahasa puak Batak (*Toba, Karo, Simalungun, Mandailing-Angkola dan Pakpak-Dairi*), berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Namun sejauh ini kami masih sendirian, pemerintah (pusat dan daerah) masih entah di mana. Tak ada lembaga yang membantu agar kebangkitan sastra ini meluas hingga ke tanah asalnya. Sebab sesungguhnya, pelestarian bahasa daerah itu harus dimulai dari daerah asalnya, sebab dari sanalah penggerusan bermula. Sejak bahasa daerah sebagai bahasa ibu tidak lagi diajarkan kepada anak-anak.

Tradisi lisan mendominasi sastra daerah. Karena itu peran buku sastra berbahasa daerah sangat penting, selain untuk pencerdasan literasi, pelestarian kearifan local, juga berperan sebagai acuan tata bahasa dan cara penulisannya. Kata yang sering didengar melalui bunyi pengucapannya, akan terbaca dalam tulisan pada buku. Oleh karena itu penulis harus menguasai betul apa yang dituliskannya. Kesalahan dalam penulisan, membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya. Berbeda dengan kesalahan dalam lisan.

8. Kosakata dan Tata Bahasa Daerah

Tidak mudah menulis sastra dalam bahasa daerah. Terutama karena kosakata yang sangat terbatas serta tata bahasa yang tidak baku. Ada buku *Tata Bahasa Batak Toba* yang disusun oleh Mgr. Dr. Ancietus B. Sinaga OFM^{Cap}, juga buku *Bahasa Batak Toba untuk Pemula* yang

disusun oleh *Drs. Richard Sinaga*. Tetapi buku ini merupakan pendapat pribadi yang bisa diperdebatkan. Saya juga membuat kaidah sendiri dalam menulis buku-buku saya, yang tentu saja perlu mendapat kesepakatan.

Belum lagi kata yang tak dikenal dalam kosakata Batak. '*Dapur*' misalnya, karena dahulu orang Batak tak kenal dapur. Rumah tradisional Batak terbuka tanpa sekat. Ruang makan, dapur bahkan kamar tidur pun tanpa sekat. Beberapa di antara kata seperti itu terpaksa dijelaskan dengan uraian.

Kesulitan kembali muncul saat bersentuhan dengan ilmu pengetahuan dan gaya hidup modern, seperti *pembangunan, komunikasi, sekolah, buku, bangku, ruang tamu, makan malam, setrika, menyetir mobil* dan lain-lain. Seringkali kata dan ungkapan dari luar bahasa Batak terpaksa dipakai dengan menggunakan dengan tanda petik atau *tulisan miring (italic)*.

Pembentukan kata baru memang perlu. Kata untuk '*maaf*' misalnya, tidak ditemukan dalam bahasa Batak. Saya ajukan '*mido anju*' sebagai ungkapan baru di komunitas Tortor Sangombas untuk mengartikan ungkapan '*minta maaf*'. Diterima setelah diskusi panjang. Selanjutnya dalam komunitas dan buku-buku yang saya tulis, terpakailah ungkapan baru itu.

Saya juga membentuk ungkapan baru lain, seperti *pasiding holang* (menepis jarak), *padimpos holong* (mempererat tali kasih), *manggorga ari sogot* (mengukir hari esok), *maniti nambur* (meniti embun pagi), *manapu nipi* (memetik impian) dan lain-lain. Ini saya anggap penting, untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa keindahan dan kekayaan bahasa daerah Batak setara dengan bahasa mana pun.

Terdapat beberapa kata atau ungkapan yang terkesan *membelakangkan* isteri. Misalnya, *pardijabu* (orang rumah), *pardihuta* (orang yang menunggu di kampung), *parsonduk bolon* (melayani suami). Ada juga kata lain yang menyetarakan suami dengan isteri, yaitu '*ripe*'. Tetapi ini kasar, mungkin setara dengan *laki atau bini*. Sebenarnya *tunggane doli* dan *tunggane boru* juga menyetarakan, tetapi terlalu formal untuk keseharian. Oleh karena itu, dalam buku terbaru kumcer *Toektak Mandoeda Eme* saya menyodorkan kata baru '*pardilambung*' (orang terdekat di samping). Ini menyetarakan, lalu diterima oleh komunitas dan pembaca buku itu. Sekarang '*pardilambung*' dipakai dalam komunitas Tortor Sangombas untuk mengartikan pasangan suami atau isteri.

Tentang kekayaan kosakata atau perbendaharaan kata, bisa dibandingkan pada novel dua bahasa yang saya tulis tahun 2012, *Mandera na Metmet (Bendera Kecil)*. Untuk bahasa Batak (*Mandera na Metmet*) saya memerlukan 18.818 kata dalam 116.250 karakter termasuk spasi. Sedangkan dalam bahasa Indonesia (*Bendera Kecil*) saya hanya memerlukan 14.411 kata

dalam 99.938 karakter. Mungkin karena kosakata bahasa Indonesia masih lebih kaya dari kosakata bahasa Batak yang saya miliki ketika itu. Atau karena banyaknya kata penghubung pada bahasa Batak, seperti terlihat pada judul *Mandera na Metmet*, harus menggunakan 3 kata. Sedangkan untuk bahasa Indonesia cukup dua kata, *Bendera Kecil*.

Contoh lain, saya menulis sebuah cerpen kearifan lokal Batak yang kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Dalam bahasa Batak berjudul *Lali Panggora*, menggunakan 2.093 kata. Dalam bahasa Belanda dengan judul yang sama (*Lali Panggora*) membutuhkan 2.784 kata. Dalam bahasa Inggris berjudul *The Hawk That Heralds Death* menggunakan 2.558 kata. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berjudul *Elang Pengabar* hanya memerlukan 1.990 kata.

Bisa diteliti lebih lanjut apakah ini menjadi indikator bahwa bahasa Indonesia memang lebih kaya dari bahasa Batak, Inggris dan Belanda. Atau, kata penghubung pada bahasa Indonesia lebih sedikit dibanding bahasa Batak serta kedua bahasa asing lainnya. Lihat misalnya, kalimat dalam bahasa Batak *di jolo ni jabu ni among ni si Janter* (9 kata), dalam bahasa Indonesia cukup dengan *'di depan rumah ayah Janter* (5 kata).

9. Kontroversi untuk Pembaharuan

Di atas ini sudah dipaparkan, bahwa kelangkaan tulisan dan bacaan berbahasa daerah, membuat generasi baru kesulitan untuk mengeja kata aslinya. Seringkali ditulis sesuai bunyi pengucapannya. Ini terjadi pada semua bahasa daerah. Misalnya, saya tidak tahu apakah *'matur suksma'* atau *'matur suksema'* (terima kasih, Bali). Juga tidak tahu mana yang benar, *'moh, emoh* atau *embuh'* (ogah, Jawa).

Tata bahasa Batak banyak mengacu pada Bibel berbahasa Batak, yang terjemahan pertama dibuat pada akhir abad ke-19. *Herman Neubronner van der Tuuk (1824-1894)* yang saat ini makamnya terbengkalai di Surabaya, adalah salah seorang pionir awal penelitian dan peletak dasar linguistika modern atas Bahasa Batak Toba. Meski sekarang ada Bibel edisi baru, tetap saja banyak kata yang sudah arkais, tidak difahami lagi oleh generasi berikutnya.

Jika konsisten pada tata bahasa yang lazim selama ini, bahasa Batak tidak mengenal *tanda penghubung*. Kata keterangan pemilik pun digabung menjadi satu. Contoh, *'Alaman parmeammeamannasida'* (= *halaman tempat bermain mereka*). Saya selalu gagap membaca kata ulang pada *parmeammeamannasida*, terlebih digabung dengan *'nasida'*. Selain itu dalam pengetikan di komputer, kata dengan jumlah 19 karakter seperti ini bisa mengurangi keindahan pengetikan, sebab akan melompat ke baris berikut jika tidak cukup tersedia tempatnya.

Oleh karena itu saya memilih untuk menuliskannya sebagai *'alaman parmeam-meaman nasida'*, sama seperti EYD bahasa Indonesia dan menggunakan tanda penghubung. Begitu pula dengan *'jabumuna'* (rumah kalian) saya tulis menjadi *'jabu muna'*, karena *'muna'* berasal dari *'ni hamuna'* (milik kalian). *'Jabunami'* saya tulis menjadi *'jabu nami'*, karena *nami* berasal dari *'ni hami'* (milik kami).

Selama ini orang Batak lazim menuliskan *'k'* menjadi *'h'*. Alasannya, mengacu pada *'bunyi pengucapan'* dan karena pada aksara Batak tidak dikenal huruf *'K'*, Perihal Batak ditulis sebagai *habatahon*, juga *habagahon* (kecantikan), *parserahan* (perantauan). Pendapat saya, karena saya menulis dalam huruf Latin (bukan dalam aksara Batak) dan huruf *'k'* tersedia pada aksara Latin, maka saya akan menuliskannya sebagai *habatakon*, *habagakon* dan *parserakan*.

Apa yang saya lakukan ini sering menjadi perdebatan (kami sebut pertengkaran kreatif), karena dianggap kontroversi. Tetapi saya yakin, kontroversi adalah benih atau embrio untuk pembaharuan. Bahasa daerah mana pun butuh pembaharuan, butuh revitalisasi. Itu pula sebabnya saya selalu menyerukan perlunya kehadiran lembaga/majelis bahasa daerah yang memiliki otoritas untuk mengukuhkan kata serapan, bentukan baru, tata bahasa dan cara penulisan baru.

10. Bahasa Daerah dan Kearifan Lokal

Era reformasi mengedepankan hukum sebagai panglima. Tetapi terasa kebablasan – karena pranata hukum terlalu jauh memasuki ranah kearifan lokal. Di berbagai daerah Nusantara banyak perkara diajukan ke pengadilan, yang sejatinya layak diselesaikan dengan kearifan lokal. Penggeseran patok kebun dan pematang sawah, pencuri buntut sapi, singkong, piring, sandal sepatu dan lain serupa itu, sekarang diajukan sampai ke pengadilan. Ada orang tua usia 70 tahun mengadukan ibunya yang berumur 90 tahun karena sengketa tanah. Ada nenek 90 tahun dihukum 18 bulan karena menebang pohon di pekuburan. Ada guru ke diseret pengadilan karena mencubit muridnya. Dahulu selalu ada kearifan lokal yang mampu menyelesaikan perkara seperti itu.

Sengketa tanah biasanya terkait kearifan lokal. Hakim Agung H. Toton Suprpto, SH mengemukakan dalam salah satu lokakarya pertanahan di Jakarta, bahwa dari 4.048 perkara kasasi yang diajukan penyelesaiannya di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI (MA) selama tahun 2001, sebanyak 2.066 kasus (51.04%) adalah kasus sengketa tanah (*satgas-peradilan.com*) Fantastis! Belum termasuk kasus yang tidak diangkat sampai ke tingkat kasasi. Memang kasus lama, tetapi bisa menggambarkan apa yang terjadi setelah reformasi.

Sudah saatnya kembali ke masyarakat hukum adat dengan kearifan lokal. Lembaga agama dan masyarakat adat harus diberdayakan. Tetapi untuk kembali mencermati kearifan lokal, satu-satunya pintu masuk yang paling tepat adalah bahasa etnik, bahasa daerah.

11. Penutup

Sastra sudah seharusnya mengembalikan manusia pada hakekatnya. Jadilah orang Indonesia dengan keberagaman khas jatidiri dan karakter Indonesia. Saya berharap usul berikut bisa direalisasikan:

1. Menetapkan payung hukum untuk pengembangan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Ibu di Indonesia, yang meminta pertanggungjawaban Pemprov, Pemkab/Pemkot untuk melestarikan dan mengembangkannya. Termasuk menyertakannya dalam kurikulum pelajaran bahasa daerah di sekolah, serta membantu penerbitan dan distribusi buku-buku berbahasa daerah, fiksi maupun non fiksi.
2. Pemerintah perlu bersinergi dengan masyarakat sastra dan bahasa daerah untuk melakukan konservasi dan revitalisasi bahasa daerah.
3. Perlu membentuk *Majelis atau Dewan Bahasa Daerah* untuk menjadi acuan literasi berbahasa daerah, baik mengenai tata bahasa, kosakata baru serta serapan, dan lain-lain.
4. Khusus untuk bahasa Batak, diperlukan Peraturan Bersama antar Bupati untuk menetapkan *Hari Bahasa Batak*. Bisa dimulai dari 4 kabupaten ex Tapanuli Utara yang berbasis bahasa Batak Toba. Jika tidak bisa sehari dalam seminggu atau sekali dalam sebulan, bisa dikaitkan dengan hari besar tertentu. Misalnya, bertepatan dengan tahun baru sesuai kalender Batak, hari ulang tahun (pemekaran) Pemkab, Hari Ulos dan lain sebagainya. Pada hari itu Pemkab mewajibkan pemakaian bahasa Batak di sekolah dan kantor di lingkungan Pemkab.

Selama ini bahasa daerah semakin dikerdilkan. Pemangku kepentingan dan pegiat sastra daerah perlu satukan langkah. Kaki kita mungkin kecil dan langkah kita mungkin tak panjang, tetapi mari kita ayun bersama.

Salam sastra.

Jakarta, 11 September 2018

Saut Poltak Tambunan

❖ *Makalah untuk Kongres Bahasa Indonesia XI, 30 Oktober 2018 di Jakarta.*